

Daftar Pustaka

- Adolf Heiken, SJ., *Kamus Jerman-Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia Jakarta, 2004.
- , *Hukum Tata Negara Darurat* Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XV, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Soehino, *Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- S Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan-Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

Makalah dan Artikel

- Manan, Bagir “*Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Membangun Hukum Nasional*” (makalah disampaikan pada pertemuan Ilmiah tentang kedudukan Biro-biro Hukum/ Unit Kerja Departemen/ LPND dalam pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994)
- Hariningsih, Sri, “*Jenis dan Fungsi Serta materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*” (makalah disampaikan pada pelatihan perancangan perundang-undangan tahap III kerjasama kementerian Hukum dan HAM RI dengan Center For International Legal Cooperation (CILC) Belanda.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

- _____, *Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.*
- _____, *Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Urutan Peraturan Perundang-undangan*
- _____, *Undang-Undang Tentang Peraturan Tentang Jenis dan Bentuk Peraturan Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. UU No 1 Tahun 1950.*
- _____, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya*
- _____, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 10 tahun 2004.*
- _____, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah UU No. 32 tahun 2004.*